



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARNOLD FIRDAUS**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **665464**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 6.410.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 258 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 770.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 840 m2/840 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 554 m2/554 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , WARISAN Rp. 2.100.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
7. Tanah Seluas 19989 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, WARISAN Rp. 1.050.000.000
8. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.000.000

1. MOBIL, SUZUKI S CROSS MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 45.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 32.500.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	6.687.500.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.687.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.